

NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA-ISRAEL DALAM PERSPEKTIF GEOPOLITIK TIMUR TENGAH

Mufti Rasyid

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

mufti.rasyid@uinsatu.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip bebas-aktif dalam politik internasionalnya telah lama berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian dunia. Selama ini konflik Israel-Palestina sebagai masalah utama yang dihadapi kawasan Timur Tengah telah menjadi perhatian utama pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah normalisasi hubungan Indonesia-Israel. Artikel ini berusaha untuk menganalisa posisi geopolitik Indonesia di Timur Tengah sebagai landasan untuk mempertimbangkan wacana membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi pustaka, penulis mencoba mengupas power yang dimiliki Indonesia, memaparkan situasi dan peran Indonesia dalam geopolitik kawasan Timur Tengah, hingga akhirnya mengaitkannya dengan wacana normalisasi hubungan diplomatik Indonesia- Israel.

Kata Kunci: *Hubungan Diplomatic, Indonesia, Israel Geopolitik, Timur Tengah.*

A. Pendahuluan

Konflik Israel-Palestina yang telah terjadi hampir satu abad selalu menjadi isu yang panas dan sensitif di tanah air. Pemerintah Indonesia selalu dihadapkan pada tuntutan dari masyarakat untuk berusaha sekuat tenaga mewujudkan perdamaian di Palestina. Pada dasarnya, sejalan dengan dinamika hubungan internasional pada level kawasan maupun global, kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia tetap mengacu pada pelaksanaan politik bebas aktif. Oleh karena itu, selain untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, Indonesia selalu berusaha mewujudkan terciptanya perdamaian dunia (Prasetya dan Srifauzi, 2018)

Komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia salah satunya terlihat dari ketegasan Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan Indonesia bagi Palestina telah dilakukan dengan berbagai upaya mulai dari diplomasi hingga kebijakan strategis dan juga berbagai jalur mulai dari keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB, OKI (Organisasi Konferensi Islam) hingga OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak). Bahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI di Istanbul Turki,

Presiden Jokowi mengatakan, “Dalam setiap helaan nafas diplomasi Indonesia, di situ terdapat keberpihakan terhadap Palestina” (Biro Pers, 2017).

Sayangnya sekeras apapun perjuangan Indonesia sepertinya belum membuahkan hasil yang maksimal. Palestina hingga sekarang masih dalam cengkeraman penjajahan Israel. Konflik antara Israel dan Palestina terus saja terjadi. Apakah Indonesia masih belum berusaha sekuat tenaga? Ataukah Indonesia kurang digdaya dalam kancah geopolitik Timur Tengah? Beranikah Indonesia mencoba strategi baru yang selama ini belum terpikirkan atau belum berani dilakukan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut seakan selalu mencera pemerintah untuk segera ditemukan jawabannya. Khusus pertanyaan terakhir, strategi baru yang saya maksud adalah normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Wacana untuk “menyapa” Israel ini tentunya sangat berani dan kontroversial. Singkat kata, bagaimana kita bisa berdialog dengan Israel demi menciptakan perdamaian jika kita tidak punya channel untuk berdialog (Burdah, 2017)

Disinilah penulis tertarik untuk membahas isu ini. Artikel ini berusaha untuk mencoba untuk menilik wacana pembukaan hubungan diplomatic dengan Israel dengan menimbang posisi geopolitik Indonesia di kancah internasional, terutama di Timur Tengah.

B. Kerangka Analisis

Geopolitik adalah ilmu yang membahas hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik menawarkan instrumen untuk menganalisis berbagai isu terkait perbatasan, sumber daya, alur, teritorial dan identitas (Dodds, 2007). Seperti disampaikan oleh Guntram dan Kaplan, pengertian mengenai negara telah berpindah dari pengertian sosial ke territorial (Herb & Kaplan, 2017).

Geopolitik adalah bagian integral dari human geography, studi sistematis tentang apa yang membuat suatu tempat unik dan bagaimana tempat itu berhubungan dan berinteraksi dengan tempat lainnya (Flint, 2006)

Kawasan Timur Tengah yang dipercaya sebagai milestone peradaban umat manusia dikenal sebagai kawasan yang unik dan penting, kaya namun berbahaya, suci tapi juga seksi. Terbentang dari ujung Sahara di Afrika Utara, bulan sabit subur di Syria, hingga ladang minyak abadi di Semenanjung Arabia, keunikan kawasan ini tak pernah henti menarik perhatian para pakar geopolitik dunia. Walaupun frasa “Timur Tengah” ini sering dikritik karena terlalu Eurosentrik dan berbau kolonialisme, setidaknya istilah ini masih relevan untuk memetakan fenomena kemanusiaan yang ada di wilayah tersebut.

Secara geografis lokasi Indonesia sangat jauh dari kawasan Timur Tengah. Memang, jika kita menggunakan kaca mata geopolitik tradisional — yang lebih menekankan konsep teritori dan batasan wilayah- Indonesia tak masuk dalam hitungan. Ledakan bom di Baghdad, gempuran rudal Israel di jalur Gaza, hingga suksesi pangeran Muhammad bin Salman di Arab Saudi tak serta merta membuat warga Indonesia panik, pun tak juga membuat harga minyak goreng berhenti naik. Namun jika kita menggunakan perspektif *critical geopolitics*, Indonesia tak bisa dipisahkan dari Timur Tengah.

Dalam kacamata *critical geopolitics*, geopolitik tak hanya melulu urusan antar negara, tetapi juga individu, komunitas, gerakan tertentu, LSM, teroris, hingga perusahaan swasta juga terlibat dalam mengontrol sebuah kawasan dan merepresentasikan dirinya dalam berbagai cara (Flint, 2006). Terlebih lagi dengan adanya globalisasi, batas-batas negara dianggap telah hilang (O'Brien 2010). Lokasi tak lagi dimaknai hanya dalam pengertian fisik, tapi juga budaya. Agnew (2000) mengungkapkan adanya 3 hal yang mengkonstruksi sebuah “*place*” (tempat) yaitu: *location, locale dan sense of place*.

Geopolitik sebagai ajang perebutan penguasaan ruang dan tempat, menitikberatkan pada konsep power atau kekuasaan. Jika geopolitik tradisional terlalu state-centric (hanya memandang power sebagai kekuatan negara untuk mengontrol dan melindungi diri dari negara lain), *critical geopolitics* menelaah lebih jauh bentuk- bentuk power lainnya seperti gender, ras, ideology, agama, dan sebagainya

C. Metode Penelitian

Artikel ini berusaha untuk menganalisa posisi geopolitik Indonesia di Timur Tengah sebagai landasan untuk mempertimbangkan wacana membuka hubungan diplomatic dengan Israel Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi pustaka, penulis mencoba mengupas *power* yang dimiliki Indonesia, memaparkan situasi dan peran Indonesia dalam geopolitik kawasan, hingga akhirnya mengaitkannya dengan wacana normalisasi hubungan diplomatik Indonesia- Israel.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Menilik Posisi Geopolitik Indonesia

Sebelum masuk pada pembahasan inti tentang wacana normalisasi hubungan diplomatic Indonesia- Israel, izinkan penulis untuk menganalisis posisi geopolitik Indonesia dalam konteks Timur Tengah. Zaman globalisasi membuat kita mendefinisikan ulang

batasan-batasan geometris yang selama ini kita sebut *place* atau tempat. Agnew (2000) mengungkapkan adanya 3 hal yang mengkonstruksi sebuah “place” (tempat) yaitu: *location*, *locale* dan *sense of place*. Mari kita *breakdown* ketiga elemen tersebut dengan mencari kaitan antara dengan Timur Tengah dan Indonesia.

Secara *location*, Timur Tengah berada di Asia bagian barat, sedangkan Indonesia terletak di Asia Tenggara. Kedua kawasan ini terpisah samudra dan daratan yang membentang sepanjang ribuan kilometer. Dari segi *location*, tak ada korelasi yang signifikan antara Timur Tengah dan Indonesia. Jauhnya jarak membuat kedua wilayah tak mungkin bersinggungan langsung secara geografis.

Dari segi *locale* (orang atau insitusi yang mengorganisasi aktivitas politik dan identitas di suatu tempat), kita baru melihat adanya kaitan antara *locale* Timur Tengah pada Indonesia, sebagai contoh: Kerajaan Arab Saudi selaku *khadimul haramain* (pemegang kendali 2 tanah suci) adalah otoritas yang memiliki hak untuk menentukan kuota haji tiap negara. Penambahan kuota haji sangat berpengaruh untuk masyarakat Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia.

Dari segi *sense of place*, kesamaan agama menciptakan identitas kolektif antara Timur Tengah dan Indonesia. Timur Tengah adalah kawasan yang diberkati sebagai tempat lahirnya Islam, sedangkan faktanya mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Menyakiti warga Palestina sama saja menyakiti warga Indonesia yang beragama Islam. Bahkan, solidaritas warga Indonesia untuk Palestina dianggap lebih kuat dibanding tetangga mereka sendiri sesama warga “Arab”.

Dapat disimpulkan bahwa walau secara *location* Timur Tengah sangat jauh dari Indonesia, secara *locale* dan *sense of place* Timur Tengah tak bisa dipisahkan dari Indonesia. Lalu seperti apakah power Indonesia dalam percaturan geopolitik di Timur Tengah? Sebelum secara spesifik membahas power Indonesia di Timur Tengah, marilah kita mengupas kekuatan Indonesia secara umum terlebih dahulu.

Menurut Lowy Institute Asia Power Index, pada tahun 2021 Indonesia menduduki peringkat ke-9 sebagai negara paling berpengaruh di Asia dengan skor 19.4, jauh di atas Thailand dan Malaysia. Hal ini membuat Indonesia berhak menyanggah gelar “*middle power*” alias negara dengan power menengah, kedudukannya dibawah negara great power namun memiliki pengaruh yang cukup diperhitungkan. Bahkan, Indonesia dianggap sebagai pemain yang paling berpengaruh secara diplomatis di Asia Tenggara. Secara khusus, Presiden Joko Widodo dianggap berhasil mengukuhkan posisinya sebagai negarawan terkemuka di panggung regional.

Kekuatan ini tak lain karena sumbangsih potensi Indonesia dari segi territory (wilayah) dan human geography (geografi manusia). Secara lokasi, Indonesia sangat strategis karena terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Hampir setengah dari seluruh perdagangan komersil dunia melewati jalur-jalur perairan Indonesia. Tak salah jika Presiden Joko Widodo mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dengan luas 3,25 juta km², perairan Indonesia diberkahi dengan sumber daya ikan laut yang rata-rata menghasilkan 7,5 juta ton per tahun. Belum lagi berbagai hasil tambang seperti briket, batu bara, gas, minyak bumi, tembaga hingga emas menjadi komoditi ekspor Indonesia ke berbagai dunia yang bernilai lebih USD 3 miliar setiap tahunnya. Rasanya tak cukup 100 halaman untuk menjelaskan potensi Indonesia dari segi sumber daya alam. Paling tidak, para pembaca sedikit memiliki gambaran dari penjelasan singkat saya ini.

Dari segi *human geography*, Indonesia dengan penduduk lebih dari 278 juta jiwa, yang terdiri dari 1.300 suku, 652 bahasa dan 6 agama (dengan Islam sebagai mayoritas), merupakan sebuah komposisi yang lengkap untuk menjadi bangsa yang besar (data BPS 2010). Apalagi usia produktif (berusia 15–60 tahun) mendominasi komposisi tersebut dengan jumlah 70,72%. Hal ini membuat Indonesia dianugerahi bonus demografi.

Ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan. Pada 2019, United Nations Development Programme (UNDP) menetapkan skor IPM Indonesia 0,718, naik 0,006 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,712. Skor IPM itu mengantarkan Indonesia pada level pembangunan manusia tinggi. Dalam kategori ini, Indonesia menempati rangking 107 dari 189 negara di dunia. Karakter umat Islam Indonesia yang cenderung moderat juga menjadi nilai plus disini.

Dengan potensi territory dan human geography yang besar akan tercipta *spatial interaction* yang luar biasa. Interaksi spasial merujuk pada aliran informasi, produk, dan individu antara berbagai lokasi yang dibangun oleh tiga hal yaitu: *complementarity*, *transferability*, dan *intervening opportunity* (Ullmer, 2002).

Complementarity berkenaan dengan relasi kebutuhan saling melengkapi. Kayanya sumber daya alam dan demografi Indonesia memungkinkan besarnya permintaan dan penawaran. Agar penawaran dan permintaan dapat bertemu maka diplomasi dibutuhkan antara kedua wilayah. Disinilah kekuatan diplomasi Indonesia teruji. *Transferability* merujuk pada interaksi dimana suatu komoditas dapat dipindahkan dari satu ruang ke ruang yang lain. Selain faktor biaya dan waktu, relugasi dan tata tertib juga perlu diperhitungkan. Selama ini pemerintah Indonesia dinilai mampu mengatur arus perpindahan

ini dengan baik sehingga memungkinkan lancarnya spatial interaction antar pihak. *Intervening opportunity* berkaitan dengan melemahnya arus komoditas antara ruang karena suatu hambatan yang ada. Misalnya jika terjadi serangan teroris di satu wilayah maka interaksi akan terganggu sehingga manusia akan memutuskan memilih tujuan lain. Kondisi Indonesia yang relatif aman dengan penduduk Muslimnya yang moderat meminimalisir terjadinya *intervening opportunity*.

2. Peran Indonesia di Timur Tengah

Melihat besarnya kekuatan dan modal yang dimiliki Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia seharusnya memiliki *bargaining position* dalam memainkan percaturan politik di dunia, terutama dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Berbicara tentang hubungan antara Indonesia dan Timur Tengah, isu utama yang selalu menjadi perhatian adalah perjuangan bangsa Palestina merebut kemerdekaan dari Israel. Mengenai hal ini, Dubes Indonesia untuk Yordania, Andy Rachmanto, menegaskan bahwa isu Palestina merupakan jantung diplomasi luar negeri Indonesia (Kompasiana, 2017).

Komitmen RI terhadap perjuangan Palestina tidak akan pernah surut, baik dalam dukungan politik, ekonomi, kemanusiaan, pembangunan kapasitas, dan lainnya. Namun mengingat jauhnya letak geografis Indonesia dari Palestina, Indonesia diharapkan dapat bekerja sama dengan negara-negara Liga Arab yang diharapkan menjadi garda terdepan. Kesamaan Bahasa, adat dan budaya diharapkan menjadi pemersatu negara-negara Liga Arab dalam memperjuangkan Palestina.

Sayangnya, dalam satu dasawarsa terakhir isu Palestina sudah tidak lagi menjadi *concern* utama di Timur Tengah. Wardoyo (2017) merangkum adanya tiga realitas yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Dalam realitas global, terjadi kontestasi antara pengaruh Amerika Serikat dengan semakin menguatnya pengaruh kekuatan global lainnya seperti Rusia dan Cina. Dalam realitas regional, terjadi pertarungan antara kekuatan-kekuatan kawasan, seperti konflik Saudi vs Iran hingga pengucilan Qatar oleh 4 Sekawan (Saudi, UEA, Kuwait, Mesir). Di dalam realitas lokal, pertarungan antar-kelompok — baik berbasis etnis maupun sekte (terutama Sunni vs Syiah) — tak henti terjadi. Interaksi antara tiga realitas di level global, regional, dan lokal di kawasan ini menentukan dinamika geopolitik Timur Tengah beberapa tahun terakhir.

Negara-negara Arab atau Timur Tengah yang diharapkan sebagai *greatest allies* untuk Palestina malah bertarung satu sama lain. Perebutan pengaruh antara Arab Saudi yang dianggap mewakili ideologi sunni dan Iran sebagai kiblat Syiah lebih menyita energi

kawasan, bahkan hingga ke level global dengan isu sectarian yang dibawanya. Apalagi konflik-konflik tersebut selalu ditunggangi kekuatan superpower seperti Amerika Serikat, Cina dan Rusia. Belum lagi konflik Qatar dengan tetangga- tetangganya (Saudi, UEA, Kuwait, Mesir) yang berebut popularitas dan super sensitif apabila ada urusan domestiknya disinggung. Masalah Palestina seakan hanya masuk *waiting list* saja.

Pada tanggal 18 Mei 2018, Israel resmi memindah ibukotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kebijakan ini sangatlah kontroversial, mengingat Yerusalem adalah kota suci umat Islam. Hal ini diperparah dengan dukungan Amerika Serikat terhadap pemindahan ibu kota ini. Negara-negara di dunia banyak sekali yang megecam, terutama negara-negara Arab, namun hanya sebatas kecaman saja. Burdah (2018) menganggap bahwa para pemimpin Arab melakukan kecaman terhadap keputusan Trump hanya untuk mengurangi tekanan domestik dari rakyatnya atau dari kelompok-kelompok Islam di negaranya masing-masing. Bagi para pemimpin Timur Tengah yang sedang dilanda persoalan di dalam negerinya, fokus utama adalah mempertahankan kekuasaan. Dalam situasi sekarang, negara-negara Arab hampir tak mungkin membuat keputusan besar bersama yang solid dan efektif.

Kembali ke Indonesia, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk Palestina? Bagi bangsa Indonesia, perjuangan dan keberpihakan kepada Palestina adalah perjuangan kebangsaan sekaligus perjuangan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan doktrin geopolitik Indonesia yang menegaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Setidaknya ada tiga senjata yang bisa dimainkan Indonesia agar bisa turut berperan dalam geopolitik timur tengah yaitu yaitu ekonomi dan budaya dan diplomasi. Dari segi ekonomi, hubungan mesra Indonesia dengan kawasan Timur Tengah terefleksi dari data-data perdagangan, investasi dan pariwisata. Kawasan Timur Tengah menyumbangkan 74,76% total realisasi PMA di Indonesia setara dengan USD 21,9 milyar. Sebanyak 75% nilai perdagangan Indonesia juga berasal dari Timur Tengah. Kawasan ini juga menyumbangkan lebih dari 83% total kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, apalagi Indonesia saat ini memimpin Moslem Friendly Tourism (MFT) di dunia. Dengan kuatnya hubungan ekonomi ini, seharusnya Indonesia bisa menekan negara-negara Timur Tengah untuk terus berjuang bersama demi memerdekakan Palestina. Dari segi budaya, tak diragukan lagi Indonesia adalah negara yang sangat penting dalam tataran geopolitik Timur Tengah. Salah satu unsur *location* adalah sense of place. Fakta bahwa penduduk Palestina beragama Islam dan lokasi Baitul Maqdis, salah satu tempat tersuci dalam Islam, yang terletak disana

menciptakan identitas kolektif antara Palestina dan Indonesia. Menyakiti warga Palestina sama saja menyakiti warga Indonesia yang beragama Islam. Solidaritas warga Indonesia terlihat dari gerakan sosial, fundraising, pemikiran hingga ajakan untuk ber-“jihad” kesana. Solidaritas ini bisa menjadi modal bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan yang terbaik demi Palestina.

Terakhir adalah senjata diplomasi,. Apalagi posisi Indonesia sebagai negara yang masuk kategori “middle power” alias power menengah yang pengaruhnya cukup diperhitungkan. Dalam Sidang Pleno yang diadakan dalam debat Majelis Umum PBB ke-67 20 Mei 2021. Menlu RI menyerukan tiga langkah yang harus dilakukan PBB: Pertama, penghentian kekerasan dan aksi militer guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Kedua, pastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Ketiga, mendorong dilangsungkannya negosiasi multilateral yang kredibel berdasarkan parameter-parameter yang disepakati secara internasional untuk mencapai “two-state solution” (solusi dua-negara).

3. Menyapa Israel: Mungkinkah?

Konsep “two-state solution” yang penulis singgung di atas memunculkan wacana menarik sekaligus kontroversial: “Normalisasi hubungan Indonesia-Israel”. Konsep ini di satu sisi mempromosikan kemerdekaan Palestina namun di sisi lain bermakna pengakuan bahwa Israel dan Palestina adalah dua negara yang sama-sama berdaulat. Agar bisa hidup akur sebagai tetangga yang baik, kedua negara harus saling mengakui kedaulatan satu sama lain, plus seluruh negara di dunia, baik itu negara Muslim maupun sekutu Israel juga harus melakukan hal yang sama. Disitulah perdamaian abadi akan tercapai.

Disinilah wacana normalisasi hubungan Indonesia dan Israel mulai menyeruak. Sebagaimana diketahui Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik. dengan Israel. Logikanya, bagaimana kita bisa mendamaikan dua tetangga yang bertengkar jika kita hanya mau menyapa satu pihak saja, sedangkan pihak satunya tak pernah kita tegur, bicara, atau kita ajak “ngopi”? Tentu saja wacana ini banyak menimbulkan dilema.

Burdah (2017) memaparkan adanya dua lapis dilema yang dihadapi Indonesia. Pertama, Indonesia tidak memiliki saluran secara langsung untuk berbicara kepada Israel. Indonesia memang bisa berbicara dengan Palestina, tetapi hal ini tidak ada gunanya. Jika kita hendak memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui proses perdamaian, yang sangat penting adalah saluran kita kepada Israel yang sayangnya tidak kita miliki. Dilema selanjutnya adalah jika kita membuka saluran komunikasi langsung dengan Israel, maka

logikanya kita memang memiliki hubungan dengan negara itu, baik di level dagang saja sebagaimana kebanyakan negara Arab atau sampai pada level diplomatik sebagaimana Mesir, Yordania, Turki, dan lainnya. Konsekuensinya hal ini bisa dianggap melanggar konstitusi sendiri karena Israel adalah penjajah.

Pada tanggal 13-14 Desember 2021, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken saat mengunjungi Indonesia sempat membicarakan masalah ini. Blinken menawarkan kemungkinan untuk melakukan normalisasi hubungan Indonesia-Israel (BBCNews, 2021). Tentunya Indonesia masih tetap konsisten pada prinsipnya untuk tidak membuka hubungan diplomatic dengan sang “penjajah”.

Prinsip yang tegas ini tentunya dipuji oleh mayoritas warga Indonesia, walau tidak sedikit pula yang menyayangkan. Machmudi (2022) menyatakan sebenarnya pemerintah boleh menormalisasi hubungan dengan Israel jika mampu mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat sebagaimana amanat konstitusi. Kalau belum ada kepastian maka butuh waktu lebih lama untuk menyamakan persepsi mengenai normalisasi. Pemerintah juga harus bisa menyampaikan kepada masyarakat alasan normalisasi ini agar publik yang menilai. Semuanya harus dilakukan secara terbuka tanpa rahasia (mengantisipasi tuduhan sebagian fihak yang menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki hubungan “rahasia” dengan Israel). Lebih lanjut Rezasyah (2022) menyatakan bahwa upaya normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel ini harus dari kacamata konstitusi dan kepentingan nasional.

Berbeda dengan para pengamat dalam negeri yang cenderung berhati-hati dalam mengomentari wacana normalisasi ini, para pengamat luar negeri seperti Dennis Ross dari The Washington Institute for Near East Policy, dengan lugas memaparkan besarnya manfaat jika normalisasi ini jadi kenyataan. Ross (2021) meramalkan akan adanya investasi sektor swasta dan publik yang signifikan. Hal ini akan mendatangkan keuntungan ekonomi yang besar. Lebih jauh Hiebert (2021) berargumen bahwa sebenarnya Indonesia sudah mempunyai hubungan informal dalam perdagangan dan diskusi antaragama dengan Israel. Jika hubungan informal ini menjadi formal akan banyak manfaat yang diperoleh.

Menurut penulis jika normalisasi hubungan diplomatic Indonesia dengan Israel hanya didasari factor ekonomi, keuntungan yang akan diperoleh tidak sebanding dengan kerugian yang diperoleh. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di bagian awal, Indonesia adalah negara “middle power” yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup stabil. Sebagai poros maritime dunia dengan indeks pembangunan manusia yang terus meningkat, ditambah sumber daya alam yang luar biasa, terlalu remeh jika kita berharap kekuatan ekonomi dengan

berjabat tangan dengan Israel. Secara geografis, potensi *territory* dan *human geography* Indonesia juga sangat besar sehingga *spatial interaction* yang ada tak akan terganggu jika kita tak mempunyai hubungan diplomatic dengan Israel.

Kembali lagi, jika wacana normalisasi hubungan ini dilakukan dengan niat untuk membuka jalur dialog dengan Israel penulis percaya bahwa ini adalah solusi yang baik. Analoginya, bagaimana kita bisa berdialog, menasehati atau bahkan memarahi teman kita yang sedang bertengkar dengan teman yang lain jika nomornya saja sudah kita blokir? Paling tidak dengan mau menyapa orang tersebut jalan damai untuk keduanya bisa tercapai. Bagaimanapun, wacana untuk “menyapa Israel” melalui normalisasi hubungan diplomatic ini perlu dikaji dengan matang dan menyeluruh agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

E. Kesimpulan

Indonesia sebagai kekuatan baru di dunia memiliki *bargaining position* yang besar dalam percaturan politik internasional. Dalam hal hubungan internasional Indonesia selalu aktif berusaha untuk mewujudkan perdamaian dunia yang salah satunya terlihat dari ketegasan Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dengan kekuatan Indonesia dalam geopolitik, Indonesia dapat memanfaatkan senjata ekonomi, budaya dan diplomasi dalam merancang geostrategi Indonesia di Timur Tengah diharapkan dapat memberi manfaat yang besar bagi semua pihak. Wacana normalisasi hubungan dengan Israel sebagai salah satu solusi diplomasi yang ditawarkan perlu dikaji dengan baik dan mendalam dengan mempertimbangkan manfaat atau *madharat*-nya, agar niat baik untuk menciptakan perdamaian dunia ini bisa tercapai.

Daftar Pustaka

- Agnew, J.A. (2000). Global Political Geography beyond Geopolitics. *International Studies Review Vol. 2, No. 1 (Spring, 2000)*, 91-99
- Andriasanti, L. (2014). Identitas Islam Moderat dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *GLOBAL Vol. 16 No. 1*, 84-101.
- Burdah, I. (2017). *Jokowi, Indonesia, dan Dilema Perjuangan Palestina*. Dimuat pada 14 Desember 2017 di <https://geotimes.id/kolom/politik/jokowi-indonesia-dan-perjuangan-palestina/>
- Burdah, I. (2018). *Yerusalem dan Kematian Perdamaian*. Artikel dimuat pada 12 Maret 2018 di <https://geotimes.id/kolom/internasional/yerusalem-dan-kematian->

[perdamaian/](#)

- Dodds, K. (2007). *Geopolitics: A Very Short Introduction*. Oxford University Press. Oxford. 2007
- Flint, C. (2006). *Introduction to Geopolitics*. Routledge Publishers. Abingdon. 2006
- Herb, G.H and Kaplan, D.H. (2017). *Scaling Identities: Nationalism and Territoriality*. Rowman & Littlefield Publishers. Lanham. 2017.
- Leichenko, R.M. and O'Brien, K.L. (2008). *Environmental Change and Globalization: Double Exposures*. Oxford University Press. Oxford. 2008
- Prasetya, M.N. dan Srifauzi, A. (2018). Diplomasi Politik Indonesia Dalam Kemerdekaan Palestina, *Jurnal PIR Vol. 2 No. 2*, 179-193
- Wardoyo, B. (2017). Dinamika Geopolitik Timur Tengah dan Pengaruhnya terhadap Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI, Vol 5 No 1 (2017)* 43- 56
- Yani, Y.M dan Matrotama I. (2015). Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik. *Jurnal Pertahanan Agustus 2015, Vol. 5, No. 2*, 25-33
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59777869>, diakses pada 26 Juni 2022 pukul 14:00
<https://international.sindonews.com/read/641339/42/ini-yang-didapat-indonesia-jika-normalisasi-dengan-israel-1640679158> diakses pada 24 Juni 2022 pukul 20:00
<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/24/20010781/bertemu-maruf-amin-dubes-yordania-apresiasi-dukungan-indonesia-ke-palestina> diakses pada 25 Juni 2022, 18:00
<https://power.lowyinstitute.org/countries/indonesia/> diakses pada 25 Juni 2022 pukul 08:00